



Kemiskinan Tanpa Klaster: Analisis Ketimpangan dan Pola Spasial Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025

Misbahuddin¹, Andi Rahmat Nizar Hidayat²

Universitas Negeri Makassar, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: misbha.misbahuddin5@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

Regional poverty disparities remain a critical development issue in Indonesia due to uneven economic growth across provinces. This study aims to examine the level of poverty inequality and to identify the spatial distribution pattern of poverty among provinces in Indonesia in 2025. A quantitative approach was employed using descriptive statistics, inequality measures including the coefficient of variation and the Gini index, as well as spatial analysis techniques such as Moran's I, Local Indicator of Spatial Association (LISA), and spatial regression. The findings reveal that the average number of poor people across provinces reached 614.73 thousand individuals, indicating a very high level of inequality (CV = 1.499; Gini = 0.591). Global spatial autocorrelation results suggest that poverty distribution does not exhibit significant spatial dependence and tends to follow a random spatial pattern. Local spatial analysis also shows the absence of strong poverty clustering at the national level. Furthermore, unemployment has a positive but statistically insignificant relationship with poverty in the spatial model. These results imply that regional structural factors play a more dominant role than geographic proximity in shaping poverty disparities in Indonesia.

Keywords: poverty, regional inequality, spatial analysis.

ABSTRAK

Kemiskinan antar wilayah di Indonesia masih menunjukkan perbedaan yang signifikan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan serta mengidentifikasi pola spasial distribusi kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif, pengukuran ketimpangan menggunakan coefficient of variation dan indeks Gini, serta analisis spasial menggunakan Moran's I, Local Indicator of Spatial Association (LISA), dan regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin antar provinsi sebesar 614,73 ribu jiwa dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi (CV = 1,499; Gini = 0,591). Uji autokorelasi spasial global menunjukkan bahwa distribusi kemiskinan tidak memiliki hubungan spasial yang signifikan dan cenderung bersifat acak secara geografis. Analisis spasial lokal juga tidak menemukan pola klaster kemiskinan yang kuat secara nasional. Selain itu, variabel pengangguran memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan dalam model spasial. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor struktural wilayah dibandingkan kedekatan geografis.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan Regional, Analisis Spasial.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan disparitas kesejahteraan antar wilayah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, faktor struktural seperti kualitas sumber daya manusia, akses infrastruktur, serta kapasitas fiskal daerah turut mempengaruhi variasi tingkat kemiskinan regional (Lestari, 2023).

Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor sosial dan spasial. Ketimpangan pembangunan antar wilayah seringkali berkaitan dengan perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan pembangunan ekonomi berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan memperkuat persistensi kemiskinan di tingkat regional (Abdullah & Astuti, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kemiskinan dan variabel sosial ekonomi. Misalnya, penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa faktor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menentukan variasi tingkat kemiskinan wilayah (Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 2026). Penelitian lain menegaskan bahwa subsidi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah (Safitri, 2022).

Kajian yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan wilayah berkaitan dengan akses infrastruktur dan kualitas tenaga kerja, sehingga wilayah perkotaan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah perdesaan (Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan, 2025). Selain itu, studi bibliometrik terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian mengenai dimensi spasial kemiskinan masih relatif terbatas dibandingkan kajian determinan ekonomi makro (Saribulan, 2023).

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan (research gap), yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara simultan mengkaji ketimpangan kemiskinan antar wilayah dengan pendekatan analisis spasial pada tingkat nasional. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan pada faktor determinan kemiskinan tanpa menguji pola autokorelasi spasial antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis ketimpangan kemiskinan antar provinsi serta mengidentifikasi pola distribusi spasial kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketimpangan kemiskinan antar provinsi di Indonesia serta menguji apakah terdapat pola autokorelasi spasial dalam distribusi kemiskinan tahun 2025. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kemiskinan regional serta menjadi dasar pertimbangan

dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual dan berbasis wilayah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional berbasis data sekunder untuk menganalisis ketimpangan dan pola spasial kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2025. Populasi penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling (sensus), namun dalam tahap analisis hanya provinsi yang memiliki data lengkap yang diikuti sebagai unit analisis. Data dikumpulkan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik berupa jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, serta data spasial berupa peta administrasi provinsi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik distribusi kemiskinan, pengukuran ketimpangan menggunakan coefficient of variation dan indeks Gini, serta analisis spasial menggunakan Moran's I untuk menguji autokorelasi spasial global dan Local Indicator of Spatial Association (LISA) untuk mengidentifikasi pola spasial lokal. Selain itu, digunakan model regresi spasial (Spatial Lag Model) untuk menguji pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dengan mempertimbangkan ketergantungan spasial antar wilayah. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R Studio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari pengolahan data sekunder jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia tahun 2025 yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik serta data spasial administrasi wilayah provinsi. Temuan penelitian disajikan dalam beberapa sub-bahasan sesuai dengan tahapan analisis yang dilakukan.

Analisis Statistik Deskriptif Kemiskinan

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia sebesar 614,73 ribu jiwa dengan standar deviasi sebesar 921,60 ribu jiwa. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi yang tinggi dalam distribusi kemiskinan antar wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi masih cukup signifikan.

Table: 1 Statistik Deskriptif Kemiskinan Antar Provinsi Tahun 2025

Indikator	Nilai
Rata-rata (ribu jiwa)	614,73
Standar deviasi	921,60
Nilai minimum	42.45
Nilai maksimum	3804.29

Analisis Ketimpangan Kemiskinan

Pengukuran ketimpangan menggunakan **Coefficient of Variation (CV)** menghasilkan nilai sebesar **1,499**, yang menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan antar provinsi berada pada kategori sangat tinggi. Selain itu, pengukuran menggunakan **indeks Gini** menghasilkan nilai sebesar **0,591**, yang mengindikasikan bahwa distribusi kemiskinan antar wilayah masih menunjukkan tingkat disparitas yang cukup besar. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Table: 2 Indikator Ketimpangan Kemiskinan Antar Provinsi Tahun 2025

Indikator Ketimpangan	Nilai
Coefficient of Variation	1,499
Indeks Gini	0,591

Analisis Pola Spasial Kemiskinan

Visualisasi spasial menggunakan peta tematik menunjukkan adanya variasi distribusi kemiskinan antar provinsi. Beberapa wilayah memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Namun demikian, hasil pengujian autokorelasi spasial global menggunakan Moran's I menunjukkan nilai sebesar $-0,034$ dengan probabilitas $0,50$, yang berarti tidak terdapat hubungan spasial yang signifikan dalam distribusi kemiskinan.

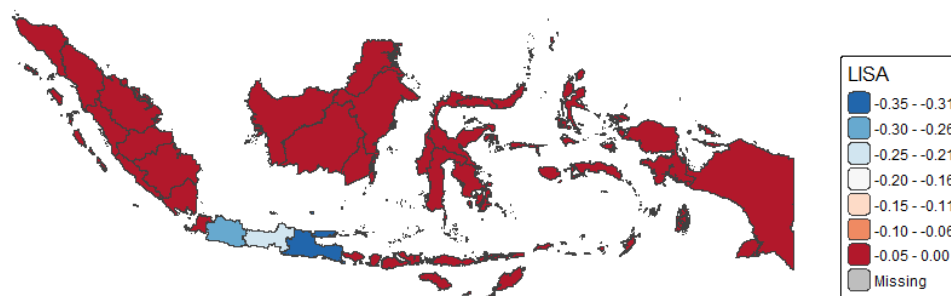
Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran kemiskinan antar provinsi di Indonesia cenderung bersifat acak dan tidak membentuk pola pengelompokan wilayah secara geografis.



Gambar: 1 Peta Distribusi Kemiskinan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025

Analisis Autokorelasi Spasial Lokal (LISA)

Hasil analisis Local Indicator of Spatial Association (LISA) menunjukkan adanya variasi nilai autokorelasi spasial lokal antar provinsi. Meskipun terdapat perbedaan nilai indeks lokal, secara umum tidak ditemukan pola kluster kemiskinan yang kuat pada tingkat nasional. Hal ini memperkuat hasil analisis Moran global yang menunjukkan bahwa distribusi kemiskinan antar wilayah tidak membentuk pengelompokan spasial yang signifikan.



Gambar: 2 Peta LISA Kemiskinan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025

Analisis Regresi Spasial

Hasil estimasi model Spatial Lag Regression menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien sebesar $4,509 \times 10^{-6}$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,4139, yang berarti variabel pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin antar provinsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran belum terbukti secara empiris mampu menjelaskan variasi kemiskinan antar wilayah dalam model spasial yang digunakan.

Di sisi lain, parameter spasial (ρ) menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik dengan nilai Log Likelihood sebesar $-224,54$ dan nilai Akaike Information Criterion (AIC) sebesar 457,08, yang lebih kecil dibandingkan model regresi linier konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa model spasial memiliki tingkat kecocokan model yang lebih baik dalam menjelaskan variasi kemiskinan regional.

Selain itu, hasil uji Lagrange Multiplier (LM) terhadap autokorelasi residual menunjukkan nilai probabilitas yang tinggi, sehingga tidak ditemukan indikasi autokorelasi spasial yang signifikan pada residual model. Dengan demikian, meskipun variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan, pendekatan regresi spasial tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kemiskinan antar wilayah di Indonesia.

Table 3. Hasil Estimasi Model Spatial Lag Kemiskinan Antar Provinsi Tahun 2025

Variabel	Koefisien	Std. Error	z-value	Probabilitas
Intersep	2,1484E+04	4,9004E-04	-	< 0,001
Pengangguran	4,5090E-06	5,5183E-06	0,817	0,4139
Parameter Spasial (ρ)	Signifikan	-	-	< 0,001

Implikasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan antar provinsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, namun tidak ditemukan pola autokorelasi spasial yang signifikan dalam distribusi kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan antar wilayah lebih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal pemerintah daerah, struktur lapangan kerja, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat seragam secara nasional berpotensi kurang efektif dalam mengatasi disparitas kemiskinan regional.

Pendekatan kebijakan berbasis wilayah (place-based policy) menjadi penting untuk diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu merancang program pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah, seperti penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengembangan infrastruktur dasar. Selain itu, kebijakan pengurangan pengangguran perlu diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Temuan bahwa variabel pengangguran belum berpengaruh signifikan dalam model spasial menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan multidimensional. Program bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan kualitas layanan publik perlu dikombinasikan dalam kerangka kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga pada upaya mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2025 masih tergolong sangat tinggi, yang tercermin dari besarnya nilai coefficient of variation dan indeks Gini, sehingga distribusi kesejahteraan antar wilayah belum merata. Namun demikian, hasil analisis spasial menunjukkan bahwa penyebaran kemiskinan tidak memiliki autokorelasi spasial yang signifikan dan cenderung bersifat acak secara geografis, yang mengindikasikan bahwa variasi kemiskinan lebih dipengaruhi oleh faktor struktural wilayah seperti kapasitas ekonomi daerah, karakteristik demografis, serta kebijakan pembangunan regional dibandingkan oleh kedekatan geografis antar provinsi. Selain itu, hasil regresi spasial menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, meskipun model spasial memberikan tingkat kecocokan yang lebih baik dibandingkan regresi linier konvensional. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat kontekstual dan berbasis wilayah melalui penguatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta integrasi program perlindungan sosial, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model analisis dengan memasukkan variabel sosial ekonomi lain dan pendekatan spasial yang lebih komprehensif. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Badan Pusat Statistik yang telah menyediakan data resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan teknis selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan dalam proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R., & Astuti, W. (2023). Analisis faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Pembangunan*, 8(2), 115–128.
- Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Kluwer Academic Publishers.
- Arbia, G. (2006). *Spatial econometrics: Statistical foundations and applications to regional convergence*. Springer.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- LeSage, J., & Pace, R. K. (2009). *Introduction to spatial econometrics*. CRC Press.
- Lestari, D. (2023). Ketimpangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 45–57.
- Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2006). Regional income disparity in Indonesia: A panel data analysis. *ASEAN Economic Bulletin*, 23(1), 31–44.
- Safitri, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan subsidi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(3), 201–214.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2009). Economic growth and poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(3), 367–396.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education